

Nama Rumpun Ilmu :AKUNTANSI

**LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**Potret Tata Kelola Penyaluran Dana Berbasis Bagi Hasil
dan Usulan Best Practice berbasis Socio-economic Justice dan
Manajemen Resiko
(Studi Empiris pada Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi DI
Yogyakarta)**

TIM PENELITI

**Dr. Rizal Yaya SE., M.Sc. Ak., CA. NIDN: 0518127301 (Ketua)
Ilham Maulana Saud, SE., M.Sc., Ak. NIDN: 05266118802 (Anggota)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
AGUSTUS 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN PRODI**

Judul Penelitian : Potret Tata Kelola Penyaluran Dana Berbasis Bagi Hasil dan Usulan Best Practice berbasis Socio-economic Justice dan Manajemen Resiko (Studi Empiris pada Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi DI Yogyakarta)

Nama Rumpun Ilmu : Akuntansi

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Dr. Rizal Yaya SE., M.Sc., Ak. CA.
b. NIDN/NIK : 0518127301/197312181999143068
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Akuntansi
e. Nomor HP : 089636751005
f. Alamat surel (e-mail) : r.yaya@umy.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Ilham Maulana Saud, SE., M.Sc., Ak
b. NIDN /NIK : 05266118802/19881126201510143106
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Akuntansi

Usulan Penelitian : Dana diusulkan keseluruhan : Rp 60.000.000,-
- Dana disetujui tahun pertama : **Rp.** 21.000.000
- Dana diusulkan tahun kedua : **Rp.** 39.000.000

Yogyakarta, 31 Agustus 2018

Mengesahkan
Ketua Prodi Studi Akuntansi



Dr. Muhammad Abdurahim SE., M.Si., Ak., CA. SAS
NIK 05201126199603143063

Ketua Peneliti,

Dr. Rizal Yaya SE., M.Sc., Ak., CA
NIK 197312181999143068



Dr. Rizal Yaya SE., M.Sc., Ak., CA
NIK 197312181999143068



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Gatot Supangkat MP.
NIP 19600608198031002

RINGKASAN

Bank Syariah dikenal sebagai bank dengan ciri khas bagi hasil. Ciri ini tergambar kuat pada aspek penghimpunan dana dengan memberikan skema imbalan berdasarkan bagi hasil. Akan tetapi pada aspek penyaluran, ciri bagi hasil kalah dominan dibanding penyaluran dengan skema jual beli yang berdasarkan pada margin yang ditentukan dimuka. Beberapa penelitian menyatakan kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tingkat resiko yang relatif lebih tinggi terdapat pada pembiayaan berbasis bagi hasil dibanding skema lainnya. Penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner dengan responden pimpina 19 Lembaga Keuangan syariah di Yogyakarta yang terdiri dari 4 Bank Umum Syariah, 4 Uni Usaha Syariah, 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan 2 BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil memiliki tren yang meningkat dalam 5 tahun terakhir di 32% LKS yang mayoritas adalah LKS dengan umur yang lebih muda. Pembiayaan berbasis bagi hasil diketahui memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari jual beli, akan tetapi juga memiliki resiko yang relatif lebih tinggi dari pembiayaan berbasis jual beli. Kendati demikian, ditemukan bahwa 59% LKS menyatakan NPF pada pembiayaan berbasis bagi hasil mereka adalah sama/lebih rendah/jauh lebih rendah dibanding NPF pembiayaan berbasis jual beli mengindikasikan bahwa NPF pembiayaan berbasis bagi hasil pada dasarnya bisa dikelola sehingga menjadi lebih baik daripada NPF jual beli.

Kata kunci: Bank Syariah, Mudharabah, Musyarakah, Bagi Hasil, Tata Kelola, Best Practices, Socio-economic Justice, Manajemen Resiko

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| RINGKASAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Kontribusi Penelitian | 5 |
| 1.4 Kaitan Rumusan Masalah dengan Road Map Penelitian | 5 |
| BAB 2 RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PROGRAM STUDI..... | 6 |
| 2.1 Renstra dan Peta Jalan Penelitian UMY dan Program Studi Akuntansi | 6 |
| 2.2 Peta jalan penelitian peneliti | 7 |
| BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 3.1 Socio-economic Justice | 8 |
| 3,2 Keuangan Syariah | 9 |
| 3.3 Pembiayaan berbasis bagi hasil | 10 |
| 3.4 Penelitian Terdahulu | 11 |
| BAB 4 METODE PENELITIAN | 14 |
| 4.1 Subyek Peneltian | 14 |
| 4.2 Metode Analisis Data | 14 |
| 4,3 Luaran Penelitian | 15 |
| BAB 5 HASIL DAN ANALISIS | 16 |
| 5.1 Gambaran Responden | 16 |
| 5.2 Gambaran Lembaga Keuangan Syariah yang diteliti | 17 |
| 5.3 Penyaluran Dana Berdasarkan Akad | 19 |
| 5.4 Kinerja Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil | 21 |
| 5.5 Tata kelola penggunaan akad berbasis bagi hasil | 24 |
| BAB 6 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN | 34 |
| 6.1 Simpulan | 34 |
| 6.2. Keterbatasan | 35 |
| 6.3 Saran | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA | 36 |
| Lampiran 1: Kuesioner Penelitian | 38 |
| Lampiran 2: Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya | 49 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Perkembangan Bank Islam di Indonesia 2003-2016 | 2 |
| Tabel 1.2. Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Akad | 3 |
| Tabel 5.1. Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad | 19 |
| Tabel 5.2. Trend Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil | 20 |
| Tabel 5.3. Akad Bagi Hasil dan Karakteristik Nasabah yang Dibiayai | 20 |
| Tabel 5.4. Durasi Akad Pada Bagi Hasil dan Murabahah | 21 |
| Tabel 5.5. Tingkat Keuntungan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil | 21 |
| Tabel 5.6. Tingkat Resiko Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Jual Beli | 22 |
| Tabel 5.7. Tingkat NPF Mudharabah dan Musyarakah | 22 |
| Tabel 5.8. Tingkat NPF Bagi Hasil Dibandingkan Murabahah | 23 |
| Tabel 5.9. Mekanisme Persetujuan | 24 |
| Tabel 5.10. Dasar Bagi Hasil Revenue Sharing | 24 |
| Tabel 5.11. Dasar Bagi Hasil Profit Sharing | 25 |
| Tabel 5.12. Dasar Acuan Bagi Hasil | 25 |
| Tabel 5.13. Komposisi Bagi Hasil | 26 |
| Tabel 5.14. Pencatatan Pendapatan Bagi Hasil | 28 |
| Tabel 5.15. Penyerahan Bagi Hasil Oleh Nasabah | 28 |
| Tabel 5.16. Penyerahan Bagi Hasil Oleh Nasabah | 29 |
| Tabel 5.17. Perhitungan Dasar Pengenaan Denda | 29 |
| Tabel 5.18. Pelaporan Keuangan Oleh Nasabah | 30 |
| Tabel 5.19. Pemeriksaan Kebenaran Laporan Keuangan Nasabah | 30 |
| Tabel 5.20. Pandangan Terhadap Kebenaran Laporan Keuangan Nasabah | 31 |
| Tabel 5.21. Kebijakan LKS Terhadap Kerugian Bukan Kelalaian Nasabah | 31 |
| Tabel 5.22. Pembinaan Bagi Nasabah | 32 |
| Tabel 5.23. Alokasi Anggaran Khusus Membantu Nasabah Dengan Akad Bagi | 32 |
| Tabel 5.24. Aspek Pembinaan Nasabah | 33 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Islam telah dipromosikan sebagai pendekatan yang dapat menjunjung tinggi keadilan sosial ekonomi dalam bisnis. Hamzah (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ekonomi dan moral seluruh masyarakat adalah misi keuangan Islam secara keseluruhan. Hal ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dimana fokusnya tidak hanya pada profitabilitas tapi juga pada tunjangan sosial bagi masyarakat. Kahf (1999) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam mendorong pembangunan ekonomi melalui hubungan langsung dengan ekonomi riil, larangan produk dan aktivitas yang haram, serta promosi keadilan ekonomi dan sosial. Hal ini akan mendorong keuangan Islam untuk tidak menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang tidak menambah ekonomi riil seperti penjadwalan hutang, *debt swap*, spekulasi dan aktivitas moneter murni lainnya. Chapra (2008) menambahkan bahwa mekanisme pengembalian tabungan dan investasi yang terkait erat dengan sektor riil telah memberi mekanisme penyesuaian yang fleksibel pada keuangan Islam dalam kasus kondisi gangguan yang tidak diterduga. Mekanismenya juga melarang pengambilan risiko yang berlebihan, seperti sekuritisasi yang rumit.

Deutsche Bank (2011) melaporkan bahwa selama krisis keuangan tahun 2008, bank-bank syariah telah menikmati pertumbuhan aset sebesar 29% hingga mencapai lebih dari 600 miliar USD di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi di timur tengah dan krisis utang “*Euro Zone*”, karena fakta melonjaknya permintaan terhadap produk yang sesuai dengan syariah tidak hanya dari pemodal di negara-negara muslim tapi juga investor secara global. Tiberge (2009) juga melaporkan bahwa Vatikan telah menyatakan pandangan mereka mengenai perbankan, bahwa untuk mengembalikan kepercayaan diri akibat krisis ekonomi global, bank-bank Barat harus mengacu pada keuangan Islam.

Pembiayaan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1980 ketika sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung membentuk keuangan mikro syariah yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berada di bawah status hukum Koperasi (Yaya dkk, 2014). Saat ini, jenis LKS ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 terdapat lebih dari 4.000 BMT yang didirikan dan melayani sekitar 3 juta pelanggan (Rizky, 2015). Jenis LKS ini didasarkan pada konsep pembuatan keseimbangan fungsi komersial (*tamwil*) dan sosial (*maal*). Fungsi komersialnya adalah melakukan kegiatan pendanaan sesuai dengan hukum Islam, sedangkan fungsi sosialnya adalah mengumpulkan dan

mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada yang membutuhkan. Meski namanya masih populer sebagai BMT namun belakangan fungsi sosialnya sedikit menurun, setelah dikeluarkannya UU Zakat tahun 2013, di mana hanya lembaga yang berlisensi dari pemerintah yang boleh mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Dalam hal perbankan, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah beroperasi sejak 1992. Setelah krisis keuangan 1997, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan mengembangkan sejumlah peraturan untuk memfasilitasi pertumbuhan bank syariah yang berkelanjutan. Inisiatif yang dibuat oleh Bank Indonesia, telah menghasilkan lebih banyak bank umum syariah, unit bisnis syariah di bawah bank konvensional, dan bank pengkreditan rakyat syariah. Tabel 1 menunjukkan kenaikan aset bank syariah dari 7,8 triliun rupiah pada tahun 2003 menjadi 356,5 triliun rupiah pada tahun 2016. Dari sisi pangsa pasar di Indonesia, perkembangannya menunjukkan ekspansi yang stabil dari 0,64% di tahun 2003 menjadi 5,21% di tahun 2016.

Tabel 1.1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 2003-2016

| | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 |
|--|---|--------|---------|---------|
| Jumlah Bank Umum Syariah | 2 (BMI established in 1992 and BSM 1999) | 5 | 11 | 13 |
| Jumlah Bank Konvensional dengan Unit Usaha Syariah | 8 | 27 | 23 | 21 |
| Jumlah BPR | 84 | 131 | 163 | 166 |
| Total Aset | 7,859 | 51,248 | 248,109 | 356,504 |
| Pangsa Pasar | 0.64% | 2.19% | 4.93% | 5.21% |

Sumber: Bank Indonesia (2003, 2008, 2013) dan OJK (2016), perhitungan sendiri untuk pangsa pasar

Karena bank-bank syariah banyak menggunakan bagi hasil untuk nasabah mereka, bank-bank syariah telah diharapkan oleh para akademisi untuk menggunakan sebagian besar kontrak bagi hasil untuk pembiayaan daripada menggunakan kontrak jual beli *Murabahah* yang cukup dekat dengan mekanisme tingkat suku bunga. Namun, ekspansi bank syariah yang stabil di Indonesia tidak juga tercermin pada peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan Yaya dan Saud (2017) memiliki keterbatasan tingkat generalisasi karena hanya dilakukan pada lima lembaga keuangan syariah. Untuk pemahaman yang lebih baik, penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif

deskriptif perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan empiris kuantitatif deskriptif untuk mengetahui praktik tata kelola yang umum diterapkan saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah pembiayaan berbasis bagi hasil bukan pilihan utama lembaga keuangan syariah
2. Apakah LKS dengan umur yang lebih muda cenderung memiliki porsi pembiayaan lebih rendah dibanding LKS yang lebih tua umurnya?
3. Apakah LKS dengan pembiayaan berbasis bagi hasil fleksibel menggunakan pendapatan dan laba sebagai dasar bagi hasil, memiliki fleksibilitas pembayaran cicilan berdasarkan siklus usaha nasabah, tidak menerapkan penalti terhadap penundaan pembayaran pokok, lebih terdorong membantu usaha nasabah jika menggunakan skema bagi hasil?
4. Apakah skema berbasis bagi hasil tidak digunakan untuk pembiayaan jangka panjang dan usaha yang baru berdiri?
5. Apakah peraturan OJK dianggap lebih ketat diterapkan pada pembiayaan berbasis bagi hasil dibanding yang berbasis jual beli.
6. Bagaimana praktik terbaik tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil yang didasarkan pada socio-economic justice.
7. Bagaimana pengelolaan resiko untuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang didasarkan pada socio-economic justice.

1.3.Rencana Capaian Tahunan

Rumusan masalah pertama hingga keenam akan dijawab pada penelitian tahun pertama dengan menggunakan metode survey kuesioner. Adapun rumusan masalah ketujuh dijawab pada tahun kedua penelitian dengan menggunakan metode focused group discussion. Rumusan masalah ketujuh. Luaran penelitian tahun pertama adalah manuscript yang disubmit pada jurnal internasional. Adapun pada tahun kedua adalah monograf tentang tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi memberi bukti empiris tentang praktik tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil dengan berdasarkan keadilan sosial ekonomi. Pemahaman terhadap praktik terbaik ini diharap bisa menjadikan lembaga keuangan syariah lebih percaya diri untuk menerapkan skema bagi hasil dalam operasional penyaluran dana.

1.5 Kaitan Rumusan Masalah dengan Road Map penelitian

Aspek tata kelola dan ekonomi syariah merupakan dua bidang unggulan penelitian UMY. Bidang unggulan tata kelola dan bidang pengembangan lembaga keuangan syariah dalam hal akuntansi syariah, telah diadopsi oleh program studi akuntansi dalam road map penelitian program studi. Penelitian ini secara khusus mendalami tentang aspek tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Permasalahan saat ini, lembaga keuangan syariah banyak dikritik kurang konsisten dengan karakter bagi hasil karena lebih dominan menggunakan skema jual beli. Akan tetapi, di lain sisi, skema bagi hasil cenderung dihindari karena disamping resiko tinggi juga karena faktor regulasi yang relatif lebih ketat. Penelitian di bidang ini masih terbatas dan lebih banyak bersifat teoritis. Yaya dan Saud (2017) telah memetakan potret tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil dengan berdasarkan studi terbatas pada lima lembaga keuangan syariah di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut telah disampaikan di International Conference on Islamic Perspective of Accounting, Finance, Economics and Management yang diselenggarakan di Istanbul Turki dan mendapat penghargaan sebagai best paper dan saat ini dalam proses publikasi di Journal of Islamic Accounting and Business Research yang terindeks scopus. Penelitian ini mengembangkan penelitian Yaya dan Saud (2017) dengan melakukan pengujian empiris kepada 11 Bank Syariah, 11 BPR Syariah and 20 BMT. Hasil penelitian dijadikan dasar merumuskan best practice tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil berdasarkan socio-economic justice. Pada tahun kedua penelitian, desain best practice berdasarkan socio-economic justice akan dikembangkan dengan memasukkan unsur manajemen resiko agar menjadi lebih aplikatif dan dapat diterima oleh praktisi perbankan. Data penelitian tahun kedua akan didasarkan pada focused group discussion melibatkan manajer dan atau direktur lembaga keuangan syariah.

BAB 2

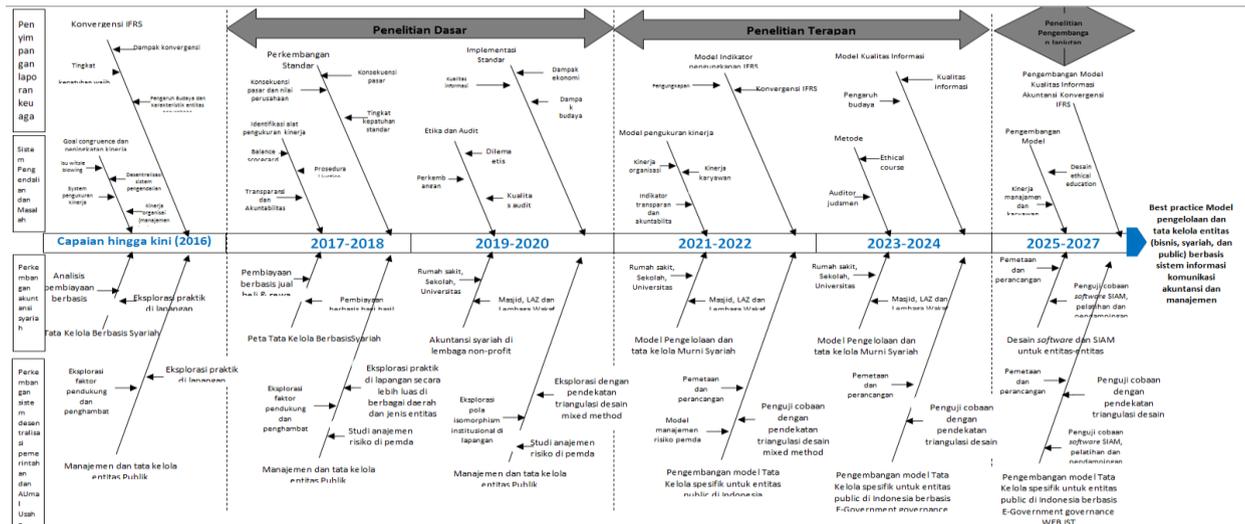
RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PROGRAM STUDI

2.1. Renstra dan Peta Jalan Penelitian UMY dan Program Studi Akuntansi

Usulan Penelitian ini merupakan upaya membangun bangunan penelitian yang telah dituangkan dalam peta jalan penelitian bidang unggulan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Peta jalan penelitian UMY kemudian diturunkan ke dalam peta jalan penelitian Prodi Akuntansi agar tercipta sinergi dengan penelitian-penelitian bidang lain. Tema besar Penelitian Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) adalah: “Membangun Masyarakat Indonesia yang Berkemajuan dan Berbudaya Luhur Melalui Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkelanjutan.” Tema besar tersebut, diterjemahkan dalam tiga bidang utama, yaitu (1) bidang pengembangan Sains, Teknologi, Industri dan Lingkungan, (2) Bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dan (3) bidang sosial budaya dan kemanusiaan. Untuk tema bidang Ekonomi, sub tema yang menjadi payung bagi riset-riset ekonomi adalah (1) Penerapan Tata Kelola pemerintahan dan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, dan (2) Penguatan regulasi dan pendayagunaan peran UMKM, lembaga keuangan syariah, dan filantropi.

Peta jalan penelitian UMY kemudian diturunkan ke dalam peta jalan penelitian Prodi Akuntansi untuk menjadi payung penelitian-penelitian di bidang akuntansi. Prodi akuntansi memilih Tema besar “Tata Kelola (Corporate Governance)”. Tema besar ini terbagi menjadi empat sub tema, yaitu (1) Penyimpangan Laporan Keuangan (terutama sektor privat), (2) Sistem Pengendalian dan Etika Profesi, (3) Perkembangan Akuntansi Syariah, dan (4) perkembangan sistem desentralisasi pemerintah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Penelitian ini didesain untuk merancang pola tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil, yang mendukung sub tema peta jalan penelitian prodi dalam hal pengembangan akuntansi syariah.

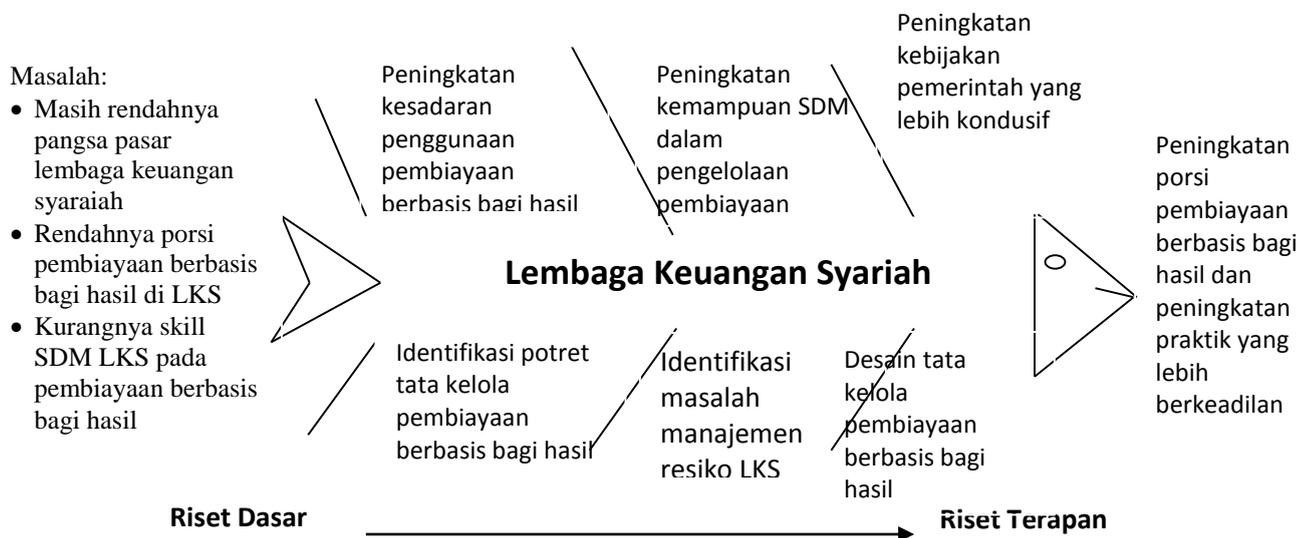
Perkembangan akuntansi syariah meliputi penerapan aspek syariah dalam bisnis dan institusi non-komersial (zakat, masjid, rumah sakit, wakaf), Aspek tata kelola yang dilihat adalah kepatuhan syariah, akuntansi zakat, akuntansi masjid, akuntansi wakaf, manajemen pengelolaan zakat, akuntansi perbankan, penerapan PSAK Syariah dan Audit Syariah.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian Program Studi Akuntansi

2.1. Peta Jalan Penelitian Peneliti

Studi sesuai dengan peta jalan peneliti dalam kluster pengembangan akuntansi syariah dalam bidang lembaga keuangan syariah. Posisi saat ini adalah sudah adanya peta tata kelola berbasis penelitian kualitatif. Ini dilanjutkan dengan penelitian berbasis empiris untuk selanjutnya pada tahun kedua dirumuskan desain tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil yang memperhatikan aspek keadilan sosial ekonomi dan manajemen resiko bank syariah. Pada saat yang sama juga diusulkan kebijakan dari regulator yang mendukung.



Gambar 2.2. Diagram Fishbone Roadmap Penelitian Tata Kelola Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

BAB 3

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Keadilan Sosial Ekonomi

Thurow (1973) mengatakan bahwa walaupun ekonomi modern pada awalnya dikembangkan untuk mencari definisi keadilan ekonomi, namun pencarian tersebut sebagian besar telah ditinggalkan. Oleh karena itu, pada tahun 1950an, pertanyaan tentang ekuitas ekonomi belum dibahas dalam buku teks ekonomi dasar, kecuali bahwa ekonomi pasar perlu dimulai dengan distribusi sumber ekonomi yang adil. Thurow menambahkan bahwa distribusi “adil” semacam itu dibiarkan kosong tanpa penjelasan lebih rinci dan secara samar diserahkan ke proses politik.

McKee (1979) mendefinisikan keadilan sebagai kehendak konstan dan abadi untuk membuat setiap orang mendapat haknya. Dia menegaskan bahwa keadilan diarahkan pada orang lain dan sangat penting untuk perdamaian dan kohesi masyarakat. Berdasarkan studinya, Thurow (1973) mengemukakan bahwa keadilan ekonomi dapat didefinisikan dari beberapa arah. Pertama, dari perspektif proses dan prosedur. Dalam perspektif ini, ekonomi dianggap adil atau setara bila individu menyetujui peraturan permainan dan hasil dari permainan itu dianggap adil. Kedua, dari perspektif preferensi individu. Berdasarkan perspektif ini, keadilan dicapai ketika hasil ekonomi adil sesuai dengan preferensi individu warga negara dan masyarakat mencapai distribusi sumber daya ekonomi yang menghasilkan kesepakatan paling banyak. Ketiga, dari perspektif jasa/usaha. Berdasarkan perspektif ini, keadilan terjadi ketika sumber daya didistribusikan dengan cara yang sama seperti jasa/usaha, sehingga, orang yang berkontribusi paling banyak akan mendapatkan yang terbaik. Akhirnya, dari perspektif kepentingan bersama, didefinisikan bahwa keadilan dapat dicapai jika distribusi sumber daya ekonomi telah memaksimalkan kebaikan bersama.

Burdenski dan Dunson (1999) mengingatkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang apa yang dihasilkannya, tetapi juga tentang bagaimana ia menyentuh kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi yang benar-benar kuat dan dinamis, keputusan ekonomi harus mempertimbangkan konsekuensi manusia dan konten moral (Burdenski dan Dunson, 1999). Dalam pelaksanaannya, harus selalu ditanyakan bagaimana pilihan ekonomi berkontribusi terhadap kepekaan terhadap mereka yang membutuhkan? Bagaimana hal itu menyeimbangkan antara tenaga kerja dan liburan yang memperbesar kapasitas persahabatan, untuk kehidupan keluarga dan masyarakat. Pertanyaan tentang solidaritas manusia harus selalu diingat dalam kesadaran apakah

keputusan ekonomi membantu atau menyakiti orang, memperkuat atau melemahkan kehidupan keluarga, dan memajukan atau mengurangi kualitas keadilan di masyarakat. Pertanyaan tentang solidaritas manusia harus selalu diingat dalam kesadaran apakah keputusan ekonomi membantu atau menyakiti orang, memperkuat atau melemahkan kehidupan keluarga, dan memajukan atau mengurangi kualitas keadilan di masyarakat. Burdinski dan Dunson (1999) menggarisbawahi bahwa tidak ada ekonomi yang benar-benar adil kecuali orang miskin termasuk dalam prosesnya.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah berupa Bank syariah, BPR Syariah dan BMT yang beroperasi di Yogyakarta. Disamping faktor biaya penelitian yang relatif murah karena juga domisili peneliti, alasan lain pemilihan Yogyakarta adalah tingginya tingkat perkembangan lembaga keuangan syariah berupa Bank dan BMT di daerah ini. Lembaga keuangan syariah yang terdapat di Yogyakarta juga sering dijadikan sebagai referensi oleh lembaga keuangan syariah di daerah lain di Indonesia. Ini bisa dilihat dari tingginya kunjungan studi banding ke lembaga keuangan syariah yang terdapat di Yogyakarta.

Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria (1) merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan skema syariah secara penuh dan bukan merupakan unit usaha dari bank konvensional; dan (2) sedang menerapkan skema berbasis bagi hasil baik berupa musyarakah atau mudhabarah. Saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah yang beroperasi di tingkat nasional, 11 BPRS dan puluhan BMT beroperasi di Yogyakarta..

4.2 Metode analisis data

Data yang diperoleh tahun pertama selanjutnya ditabulasi dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif SPSS. Adapun data focus group discussion pada tahun kedua akan dianalisis untuk mengidentifikasi keberterimaan usulan desain tata kelola oleh lembaga keuangan syariah yang ada.

4.2.Luaran Penelitian

4.3.1 Luaran Tahun Pertama

Luaran tahun pertama penelitian ini adalah manuskrip yang akan dikirim ke jurnal internasional. Ini sangat potensial untuk dipublikasikan mengingat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yaya dan Saud (2017) dinyatakan sebagai best paper di International Conference on Islamic Accounting, Finance, Economics and Management di Istanbul Turki. Luaran tahun kedua

adalah desain tata kelola yang memperhatikan aspek resiko dan keadilan sosial ekonomi untuk ditawarkan kepada Lembaga Keuangan Syariah.

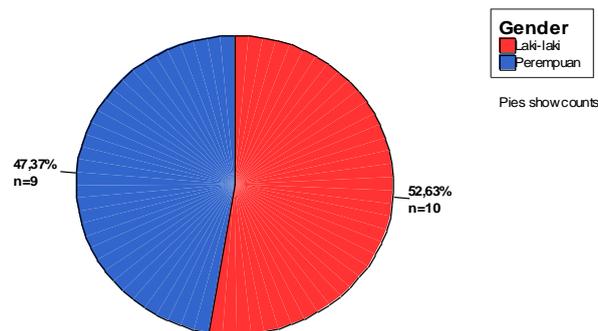
4.3.1 Luaran Tahun Kedua

Luaran tahun kedua adalah desain tata kelola yang memperhatikan aspek resiko dan keadilan sosial ekonomi untuk ditawarkan kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ini sangat dimungkinkan untuk dipertimbangkan mengingat lembaga keuangan syariah sedang dalam posisi mencari keseimbangan antara praktik selama ini dengan harapan masyarakat adanya sesuatu yang berbeda secara substansial pada bank syariah dibanding dari sebatas kesesuaian dengan hukum syariah.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

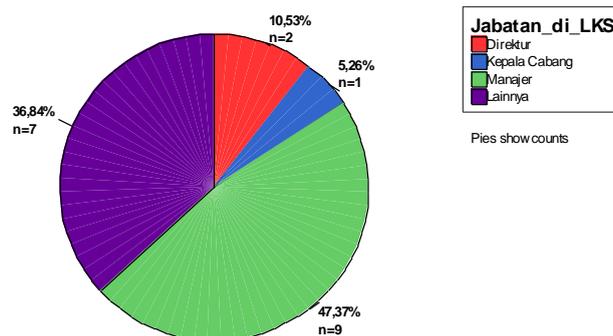
5.1 Gambaran Responden

Secara keseluruhan terdapat 19 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan gender, responden penelitian ini hamper seimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu 52,63% (10 orang) laki-laki dan 47,37% (9 orang) perempuan.



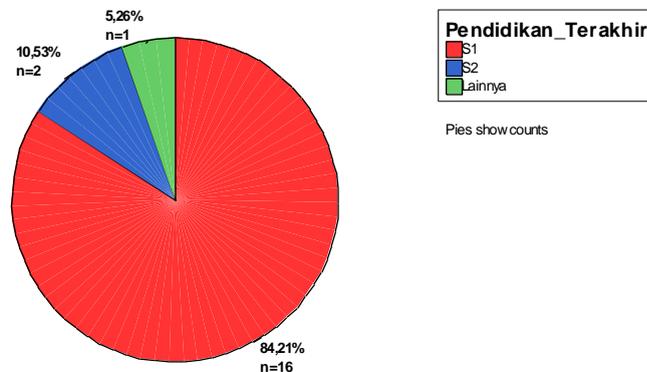
Gambar 5.1 Responden berdasarkan gender

Responden penelitian ini bervariasi dalam hal posisi di lembaga keuangan syariah mereka bekerja. Yang terbanyak adalah pada posisi Manajer yaitu sebanyak 47,37% (9 orang). Posisi yang lain adalah Direktur 10,53% (2 orang) dan lainnya.



Gambar 5.2 Responden berdasarkan Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah

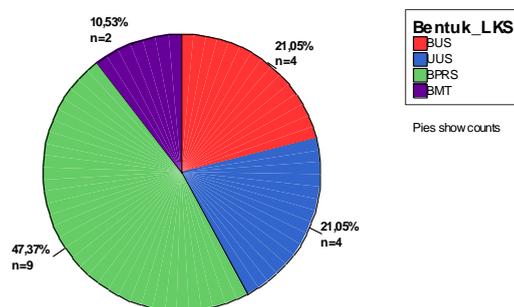
Dari segi pendidikan mayoritas responden (84,21%) berpendidikan strata Sarjana. Sisanya adalah S2 dan Diploma.



Gambar 5.3 Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

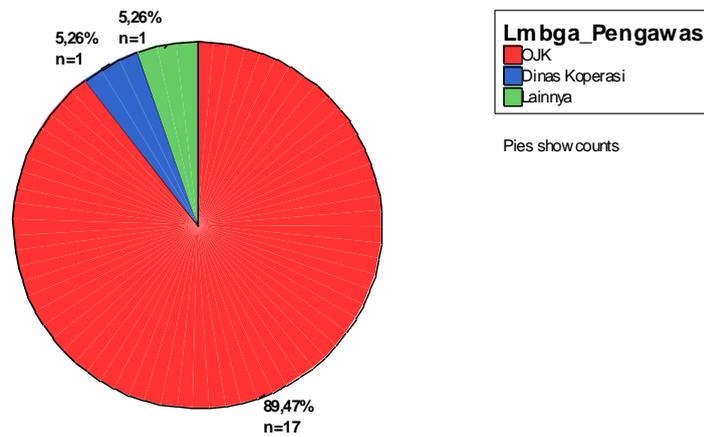
5.2 Gambaran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel penelitian ini berasal terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Responden terbanyak adalah BPRS sebanyak 9 BPRS atau 47,37% dari total responden, selanjutnya disusul UUS dan BUS masing-masing 4 lembaga yang berpartisipasi dan BMT sebanyak dua lembaga.

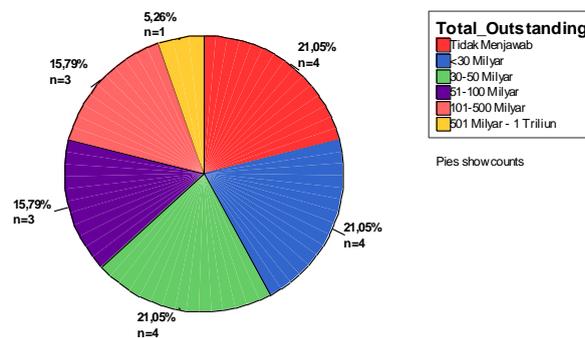


Gambar 5.4 Responden berdasarkan bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Semua BUS, UUS dan BPRS berbadan hukum PT, adapun BMT berbadan hukum koperasi. Yang berbadan hukum semuanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, adapun yang BMT diawasi oleh Dinas Koperasi.



Gambar 5.5 Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan lembaga Pengawas
 Penyaluran pembiayaan LKS di wilayah DI Yogyakarta pada LKS yang diteliti sangat beragam, Yang terbesar adalah memiliki outstanding sebedar 501 milyar sampai dengan 1 triliun rupiah (5.36%, 1 LKS) dan yang terkecil adalah dibawah 30 milyar (sebanyak 4 LKS atau 21% dari total responden). Yang menarik, satu dari dua BMT yang diteliti memiliki penyaluran dalam kategor 30-50 milyar.



Gambar 5.6 Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Outstanding Pembiayaan

5.3 Penyaluran Dana Berdasarkan Akad

Penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dapat dilakukan dengan akad jual beli seperti murabahah, dalam dan istisna'. Akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah serta akad sewa dan pinjaman qardh .

Tabel 5.1. Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad

| Jawaban | Musyarakah | | Mudharabah | | Murabahah | | Salam | | Istisna' | | Ijarah | | Qardh | |
|----------------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|-------|------|----------|------|--------|------|-------|------|
| | jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % |
| Tidak Menjawab | | | | | | | 2 | 11% | 2 | 11% | 1 | 5% | 1 | 5% |
| Tidak Pernah Dipraktikkan | 2 | 11% | 1 | 5% | 0 | 0% | 14 | 74% | 13 | 68% | 4 | 21% | 2 | 11% |
| Jarang Dipraktikkan | 0 | 0% | 2 | 11% | 0 | 0% | 3 | 16% | 1 | 5% | 2 | 11% | 3 | 16% |
| Kadang-kadang Dipraktikkan | 6 | 32% | 8 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11% | 7 | 37% |
| Sering Dipraktikkan | 6 | 32% | 4 | 21% | 5 | 26% | 0 | 0% | 2 | 11% | 6 | 32% | 3 | 16% |
| Selalu Dipraktikkan | 5 | 26% | 4 | 21% | 14 | 74% | 0 | 0% | 1 | 5% | 4 | 21% | 3 | 16% |
| Total | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% |

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa jenis akad yang banyak dipakai adalah Murabahah (100% dijawab dengan jawaban sering/selalu dipakai). Selanjutnya adalah akad Musyarakah (58% sering atau selalu dipraktikkan) dan disusul oleh ijarah, mudharabah, qardh dan istisna'. Adapun LKS sama sekali tidak menerapkan salam. Ini mengkonfirmasi data di tingkat nasional bahwa akad yang dominan digunakan adalah akad murabahah.

Pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki tren yang berbeda antar lembaga keuangan syariah. Sebanyak 32% LK menunjukkan memiliki tren yang menaik, tapi sebanyak 16% menyatakan tren yang menurun. Pada LKS dengan tren yang tidak stabil banyak memiliki jumlah pembiayaan bagi hasil yang lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya (21% lembaga). Sebanyak 26% memiliki tren yang tetap. Jika dianalisis lebih dalam, perbedaan karakteristik memiliki pola tertentu. Pada LKS dengan umur yang cenderung muda (5-9 tahun) mayoritas memiliki tren menaik 43%, adapun LKS dengan umur yang tua (di penelitian ini 20-24 tahun), mayoritas memiliki tren yang tetap 67%

Tabel 5.2. Trend Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

| Trend_Proporsi_Skema_BagiHasil | 5-9 Tahun | | 10-14 Tahun | | 15-19 Tahun | | 20-24 Tahun | | Total | |
|--|-----------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|------|
| | jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % |
| Cenderung Menurun | 1 | 14% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 16% |
| Tidak Stabil dan Sekarang Lebih Rendah dari 5 Tahun Lalu | 1 | 14% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 21% |
| Cenderung Tetap | 2 | 29% | 1 | 13% | 0 | 0% | 2 | 67% | 5 | 26% |
| Tidak Stabil dan Sekarang Lebih Tinggi dari 5 Tahun Lalu | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 5% |
| Cenderung Meningkatkan | 3 | 43% | 2 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% | 6 | 32% |
| Jumlah | 7 | 100% | 8 | 100% | 1 | 100% | 3 | 100% | 19 | 100% |

BAB 6

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini melihat tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil dan menganalisisnya dari perspektif keadilan sosio ekonomis yang merupakan salah satu landasan filosofis perlu dikembangkannya perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil memiliki tren yang meningkat dalam 5 tahun terakhir di 32% LKS yang mayoritas adalah LKS dengan umur yang lebih muda. Adapun di LKS yang tua, punya kecenderungan untuk tetap. Pembiayaan berbasis bagi hasil diketahui memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari jual beli, akan tetapi juga memiliki resiko yang relative lebih tinggi dari pembiayaan berbasis jual beli. Kendati demikian, ditemukan bahwa 59% LKS menyatakan NPF pada pembiayaan berbasis bagi hasil mereka adalah sama/lebihrendah/jauh lebih rendah dibanding NPF pembiayaan berbasis jual beli. Ini mengindikasikan bahwa NPF pembiayaan berbasis bagi hasil pada dasarnya bisa dikelola sehingga menjadi lebih baik daripada NPF jual beli.

6.2. Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada 19 LKS di Yogyakarta yang terdiri dari 4 BU, 4 UUS, 9 BPRS dan 2 BMT. Ini masih belum ideal.

6.3 Saran

Penelitian kedepan perlu menambah sampel dan memperluas scope penelitian ke tingkat nasional

5.3 Referensi

- Ascarya (2013) "The persistent lack of profit-and-loss sharing financing in Indonesia's Islamic Banks". Paper at *The International Islamic Finance Conference* April 14-16, 2013, Abu Dhabi, UAE
- Bank Indonesia (2003), *Statistik Perbankan Syariah* (Islamic Banking Statistics). Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia (2008), *Statistik Perbankan Syariah* (Islamic Banking Statistics). Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia (2013), *Statistik Perbankan Syariah* (Islamic Banking Statistics). Bank Indonesia, Jakarta.
- Burdenksi, H. M. and Dunson, D. H. (1999), "Acquiring Economic Justice for All: An Ongoing Struggle", *Journal of Business Ethics*, Vol. 20, No. 2, pp. 93-99.
- Chapra, U. (2008), "The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future", Paper for the *Forum on the Global Financial Crisis*, held at the Islamic Development Bank, Jeddah
- Cihák, M. and Hesse, H. (2008), *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*, *International Monetary Fund (IMF), Working Paper 08/16*, IMF. Washington DC.
- Dar, H., A. and Presley, J., R. (2000), *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*, Economic Research Paper No. 00/24, Loughborough University, Loughborough.
- Deutsche Bank. 2011. *Global Islamic Banking Report*. November. London, UK.
- Furqaini, N and Yaya, R. (2016), "Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan porsi bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia (Factors that affect the volume and portion of Profit sharing financing)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*. Vol.7 No.1, pp. 22 – 38. (in Bahasa Indonesia).
- Hamzah, T., R. (2015), "Islamic Finance as the Way Ahead for the Socio-economic Empowerment of the Global Ummah" retrieved 23rd July 2017 at <https://internationalbanker.com/finance/Islamic-finance-as-the-way-ahead-for-the-socio-economic-empowerment-of-the-global-ummah/>
- Haniffa, R. and Hudaib, M. (2010), "Islamic finance: from sacred intentions to secular goals?", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 1 No. 2, pp. 85-91.
- Kahf, M. (2007), "Islamic Banks at the Threshold of the Third Millennium", *Thunderbird International Business Review*, Vol. 41 No. 4, pp. 6-16.
- Kelana, I (2015), Bank Syariah di DIY yakin tumbuh 16% (Islamic bank is confident to grow at 16%), *Harian Republika*, retrieved on 23rd July 2017 <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-%09koran/15/03/25/nlrfom4-bank-syariah-di-diy-yakin-tumbuh-16-persen>
- Mauro, F., Caristi, P., Couderc, S. Maria, A., D., Ho, L., Grewal, B. K. Maciantonio, S., Ongena S and Zaher, S. (2013), *Islamic Finance in Europe, Occasional Paper Series no 146*. European Central Bank, Frankfurt.
- Majid, M.S.A, and Kassim, S.H. (2015) "Assessing the contribution of Islamic finance to economic growth", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 6 No. 2. pp. 292 – 310.
- McKee, A. F. (1979) "From a theory of economic justice to its implementation", *Review of Social Economy*, Vol. 37, No. 1, pp. 63-78.
- Nugraha, W. N. (2016) Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Yogyakarta Ungguli Nasional (Islamic bank growth in Yogyakarta ahead national growth), *Tribun Yogya Newspaper*, retrieved 23

- July 2016 at <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/22/tingkat-pertumbuhan-bank-syariah-yogyakarta-ungguli-nasional>
- Otoritas Jasa Keuangan (2016), *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Pesendorfer, J. and Lehner, O. (2016), "Islamic Banking and Finance as an Ethical Alternative: a Systematic Literature Review", *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, Vol. 5 No. 2, pp. 42-64.
- Rizky, A. (2015), Perkembangan BMT dari tahun ke tahun <https://nofikusriatun96.wordpress.com/2015/06/11/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun/>
- Said, M.M and Elangkovan, K (2014) "Prosperity and Social Justice Consequences of Applying Ethical Norms of Islamic Finance: Literature Review", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5 No. 2, pp. 99-107.
- Shaikh, S.A. (2017), "Poverty alleviation through financing microenterprises with equity finance", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 No 1. Pp 87-99.
- Stiglitz, J. (2009). "The Global Crisis, Social Protection and Jobs". *International Labour Review*, Vol. 148 No. 1–2. pp. 1-13.
- Tabash, M. I. and Dhankar, R.S. (2014), "The Relevance of Islamic Finance Principles in Economic Growth", *International Journal of Emerging Research in Management & Technology*, Vol. 3 No. 2, pp. 49-54.
- Thurow, L. (1973), "Toward a definition of economic justice", *The Public Interest*, Spring, pp. 56-80.
- Tiberge (2009), Vatican Paper Supports Islamic Finance. France Wants Its Share of Sharia Banking, *The Brussels Journal*, retrieved 30 July 2017 at <https://www.brusselsjournal.com/node/3819>
- Warde, I. (2000), *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Yaya, R., Erlangga, A., and Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer - Berdasarkan PAPSII 2013 edisi ke-2*. (Accounting for Islamic Banking: Theory and Contemporary Practices – based on PAPSII 2013 2nd ed). Salemba Empat. Jakarta. (in Bahasa Indonesia).
- Yaya, R dan Saud, I., M. (2017) Governance of Profit and Loss Sharing Financing in Achieving Socio-economic Justice. 3rd International Conference on Islamic Perspective of Accounting, Finance, Economics and Management, 23 -25 November, Yıldız Technical University, Istanbul.
- Zakaullah, M. A. (2000). "The Crisis Of Global Capitalism: Open Society Endangered". Book Review, *IJUM Journal of Economics and Management* 8, no. 2.